

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN KEPALA KELUARGA OLEH DINAS SOSIAL  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK KOTA BANJAR (STUDI ANALISIS DI DESA  
KARYAMUKRI KECAMATAN PATARUMAN KOTA  
BANJAR)**

**Feni Tri Riandari**

*Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia*

E-mail : Fenitri09@gmail.com

**ABSTRAK**

*Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Untuk mengetahui Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan (PEKKA) di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar.2). Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengimplementasikan Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar.3). Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam mengimplementasikan Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar. Adapun Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebanyak 7 orang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Banjar ( Studi Analisis Di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar), menyatakan bahwa dari 8 indikator, 5 indikator sudah berjalan cukup baik dan 3 indikator lainnya belum berjalan dengan baik. Adanya hambatan-hambatan seperti, keterbatasan tempat untuk melakukan pemasaran, kemudian belm ada lagi bantuan yang diberikan. Adapun upaya yang dilakukan seperti, pemasaran hasil karya di media sosial, kemudian menggunakan dana pribadi dalam membuat program.*

**Kata Kunci :** *Implementasi, Pemberdayaan, PEKKA*

## PENDAHULUAN

Implementasi merupakan suatu penerapan peraturan atau pelaksanaan kerja yang sesuai dengan aturan yang berlaku secara langsung oleh instansi atau organisasi. Kata implementasi berasal dari bahasa Inggris “ *to implement* ” yang artinya mengimplementasikan. Implementasi bisa juga dikatakan sebagai suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius guna mencapai suatu tujuan. Pemberdayaan merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mendorong masyarakat agar mampu menyesuaikan dengan keadaan saat ini, dan juga masyarakat bisa menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya dalam mencapai tujuan dalam jangka yang panjang.

Berkaitan dengan Pemberdayaan, saat ini pemerintah pusat sudah mencanangkan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mana didalamnya diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri rumah tangga Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan.

Saat ini program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjar, dan Dinas tersebut telah melaksanakan pelatihan kepada kaum perempuan

untuk mendapatkan penghasilan yang lebih dalam rumah tangga, karena melihat banyaknya perempuan yang ditinggalkan oleh kepala keluarga mulai dari suaminya yang meninggal sampai suaminya yang pergi merantau, maka saat ini pemerintah Kota Banjar khususnya Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan Pelatihan yang memang dirasa sangat penting dalam keberlangsungan hidup masyarakat yang ada di Kota Banjar.

Sehubungan dengan uraian-uraian masalah di atas, berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti di Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Banjar ditemukan masalah bahwa Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar belum terlaksana dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut:

1. Menurunnya antusias anggota kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dalam kegiatan Pelatihan yang diberikan oleh pendamping. Hal ini disebabkan karena para anggota kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga lebih mementingkan kesibukan masing-masing dibandingkan kepentingan kelompok. Contohnya: Para anggota

- kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang telah diberikan tugas untuk mengembangkan Usaha Kecil Mikro (UKM) tidak bisa fokus disebabkan karena masih banyaknya kegiatan sehari-hari di lingkungan rumah para anggota Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), seperti: mengurus kebutuhan rumah tangga, mengurus kebutuhan anak-anaknya, mengurus lahan pertanian, serta mengurus hal lainnya.
2. Belum adanya kegiatan pemasaran atas hasil karya Kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga. Hal itu terlihat dari hasil karya kelompok baik dalam bentuk barang, atau makanan untuk dijual namun belum bisa dipasarkan. Contohnya: Hasil karya Kelompok berupa makanan ringan belum tersebar ke setiap wilayah di Kota Banjar karena masih minimnya pasar yang menerima hasil karya Kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga.
  3. Tidak adanya dana dukungan serta sarana prasarana yang menunjang untuk program PEKKA. Hal itu terlihat dari karena Kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga tidak berbadan hukum, dan bukan lembaga yang berbadan hukum.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, selanjutnya peneliti menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan (PEKKA) di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengimplementasikan Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam mengimplementasikan Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar?

## **KAJIAN PUSTAKA**

Implementasi kebijakan menurut Meter dan Horn (Winarno, 2014:149) Implementasi adalah ‘Tindakan-Tindakan yang dilakukan oleh individu-individu ataupun kelompok yang diarahkan guna mencapai suatu tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya’. Adapun pengertian implementasi menurut Winarno

(2014:147) “Merupakan sebuah fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatukeluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*)”.

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplemetasikan kebijakan Negara secara sempurna menurut teori implementasi Brian dan Lewis (Tahir, 2014: 88-89) sebagai berikut:

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya;
2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai;
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia;
4. Kebijaksanaan yang akan di implementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kualitas yang handal;
5. Hubungan kualitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya;
6. Hubungan saling ketergantungan kecil;
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan;
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat;

9. Komunikasi dan kordinasi yang sempurna;

10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah bukan hanya untuk dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri namun tetap masyarakat yang ada di dalam lingkungan tersebut harus melaksanakannya. Karena pada dasarnya akan terjadi kepuasan bagi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan jika masyarakat tahu atau paham tentang pelaksanaan kebijakan tersebut.

Implementasi menurut Edward III (Agustino, 2017:136-141) menyatakan bahwa, ‘Ada empat faktor atau variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu: Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.’

Lebih lanjut Edward III (Agustino, 2017:136-141) menjelaskan pengertian keempat faktor atau variable dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi  
Komunikasi, menurutnya, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap

keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus di transmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan di dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga Indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi di atas, yaitu; Transmisi, kejelasan dan konsistensi.

2. Sumber daya

Yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Menurutnya, dalam mengimplementasikan kebijakan ada indikator sumber-sumber daya terdiri beberapa elemen, yaitu; Staf, Informasi dan wewenang serta fasilitas.

3. Disposisi

Yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah Disposisi. Menurutnya, Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu

kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya tidak biasa.

Hal penting yang harus dicermati pada variable disposisi, Menurut Edward III, adalah: Efek disposisi, Melakukan Pengaturan Birokasi dan Insentif.

4. Struktur Birokrasi

Yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Menurutnya, Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksanan atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalanya kebijakan.

Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik yang dapat mengdongkrsk kinerja struktur birokrasi atau organisasi kearah yang lebih baik: Membuat Standar Operating Procedures (SOP), Melaksanakan fragmentasi.

Menurut Hogwood dan Gunn (Nugroho, 2012:449) tahapan implementasi kebijakan sebagai berikut :

1. Tahap pertama terdiri atas kegiatan-kegiatan
  - a. Menggambarkan suatu rencana program dengan penetapan tujuan secara jelas.
  - b. Menentukan setandar pelaksanaan.
  - c. Menentukan biaya yang akan digunakan serta waktu pelaksanaan.
2. Tahapan kedua merupakan tahapan pelaksanaan program dengan mendayagunakan staf-staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode.
3. Tahapan ketiga terdiri atas kegiatan-kegiatan:
  - a. Menentukan jadwal.
  - b. Melakukan pemantauan.
  - c. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program

Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) adalah Perempuan yang melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, pengelola rumah tangga, penjaga keberlangsungan kehidupan keluarga, dan pengambil keputusan dalam keluarga.

Oleh karena itu Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) mendampingi komunitas perempuan yang mencakup :

1. Perempuan yang ditinggal/dicerai suaminya;
2. Perempuan yang suaminya meninggal dunia;
3. Perempuan yang membujang atau tidak menikah dan memiliki tanggungan keluarga;
4. Perempuan bersuami, tetapi oleh karena suatu hal, suaminya tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga;
5. Perempuan bersuami, namun suami tidak hidup dengannya secara berkesinambungan karena merantau atau berpoligami.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif atau dengan penelitian deskriptif analisis. Lamanya penelitian ini adalah 10 bulan. Sedangkan informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 1 Kepala Bidang, 1 Kepala Seksi, 1 Pendamping Anggota, dan 3 Anggota Kelompok. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi

lapangan, observasi, dan wawancara. Dan teknik pengolahan data/analisa data melalui reduksi data, data display, dan kesimpulan/verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjar (Studi Analisis di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar)**

Agar tercapainya implementasi program PEKKA dengan baik, maka harus ada suatu penerapan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas yang memiliki wewenang melakukan perbaikan. Proses implementasi program dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai sasaran, maka perlu diperhatikan kebijakan-kebijakan publik dengan baik. Adapun teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut adalah teori menurut Edward III (2017: 136) empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dengan informan, maka peneliti akan melakukan pembahasan mengenai Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan

Kepala Keluarga oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjar (Studi Analisis di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar), yang sejauh ini dalam pelaksanaannya bisa dikatakan sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari 4 dimensi dan 8 indikator yang dijadikan alat ukur penelitian. Baru 5 indikator yang sudah baik dan 3 indikator masih kurang baik seperti sumber daya yang belum adanya dukungan sarana dan prasarana serta kehadiran anggota yang masih kurang. Kemudian peneliti dapat menjelaskan mengenai observasi lapangan bahwa belum berjalan maksimal hal ini terlihat dari dimensi struktur birokrasi dimana masih terbatas dalam memasarkan produk dari kelompok PEKKA .

### **2. Hambatan-Hambatan Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjar (Studi Analisis di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar)**

Dalam kegiatan implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjar, dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan Untuk pembahasan mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Program

Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjar diuraikan dalam dimensi-dimensi sebagai berikut:

Penyampaian gaya bahasa yang disampaikan terkadang sulit dipahami oleh Anggota PEKKA sehingga pendamping kelompok harus selalu mengulang-ulang apa yang disampaikan.

1. Adanya masalah kehadiran dimana para anggotanya tidak bisa selalu hadir setiap ada kegiatan karena memiliki kesibukan lain yang tidak bisa ditinggalkan, selain itu ada juga anggota yang sakit sehingga tidak bisa menghadiri kegiatan dalam kelompok PEKKA. Oleh karena setiap pelatihan ataupun pendidikan dalam kelompok PEKKA sering kali tidak dihadiri beberapa anggota. Selain itu untuk memperoleh dukungan dana, sarana dan prasarana bagi kelompok PEKKA adalah harus berbadan hukum, sementara PEKAA bukan lembaga yang berbadan hukum sehingga kesulitan dalam menerima bantuan.
2. Dalam kreativitas pendamping kelompok untuk menjalan program PEKKA diketahui bahwa penerapan kepada anggota kelompok

cukup sulit karena tidak semua anggota mengerti dan menjalankan ide yang diberikan begitu saja.

3. Dalam struktur birokrasi seringkali terjadi perbedaan pendapat yang akhirnya menyebabkan terjadinya *miss communication*, sehingga proses pemasaran pun menjadi terganggu.

Kebijakan yang telah ditetapkan harus secepatnya diimplementasikan. Namun dalam tataran implementasi terdapat proses dan tahapan-tahapan yang harus dihadapi dan diselesaikan. Adapun proses ataupun tahapan-tahapan implementasi menurut Islamy (2014:7) terdiri dari empat komponen yakni sebagai berikut:

1. Kebijakan yang diinginkan adalah pola-pola interaksi yang diinginkan oleh mereka yang telah mendefinisikan kebijakan.
2. Kelompok sasaran adalah mereka yang diminta oleh kebijakan untuk mengadopsi pola-pola interaksi baru. Mereka adalah orang-orang yang paling banyak terkena dampak kebijakan.
3. Organisasi pelaksana adalah unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan.
4. Faktor-faktor lingkungan adalah unsur-unsur/komponen yang ada di lingkungan yang



berpengaruh terhadap atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan.

**3. Upaya-upaya Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjar (Studi Analisis di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar)**

1. Menyederhanakan informasi-informasi yang diterima oleh pendamping kelompok yang kemudian harus disampaikan kepada kelompok agar apa yang disampaikan bisa dapat dipahami.
2. Untuk indikator mengedepankan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota kelompok, upaya yang dilakukan adalah, lebih menekankan kepada ketua, bendahara dan sekreasaris untuk bisa hadir agar bisa memberikan apa yang didapat dari kegiatan pelatihan.
3. Berupaya untuk menjelaskan lebih detail, singkat dan jelas mengenai ide-ide kegiatan yang diberikan kepada anggota PEKKA sehingga dapat di pahami dengan

mudah dalam menjalankan program tersebut.

4. Agar tercipta kerjasama baik sehingga terhindar dari *miss communication* maka dilaksanakan komunikasi yang baik, tukar pendapat dan informasi. Selain itu untuk pemasarannya sendiri terus diupayakan dengan memanfaatkan media online.

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplemetasikan kebijakan secara sempurna menurut teori implementasi Brian dan Lewis (Tahir, 2014: 88-89) sebagai berikut:

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya;
2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai;
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia;
4. Kebijakan yang akan di implementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kualitas yang handal;
5. Hubungan kualitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya;
6. Hubungan saling ketergantungan kecil;

7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan;
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat;
9. Komunikasi dan kordinasi yang sempurna;
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjar ( Studi Analisis di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjar, sejauh ini bisa dikatakan cukup baik namun belum maksimal. Hal tersebut diketahui karena dari lima dimensi yang dijadikan sebagai identifikasi masih ditemukan beberapa hambatab. Adapun dimensi yang masih belum berjalan maskimal diantaranya sumber daya di mana belum adanya dukungan sarana dan

prasarana serta kehadiran anggota yang masih kurang dan dimensi struktur birokrasi di mana masih terbatas dalam memasarkan produk dari kelompok PEKKA.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjar antara lain, belum adanya dukungan sarana dan prasarana, kehadiran dari anggota yang kurang dalam pelaksanaan pelatihan, dan pemasaran hasil karya yang dibuat oleh kelompok yang masih terbatas dalam memasarkannya.
3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjar antara lain, menggunakan dana pribadi dalam melakukan kegiatan seperti pembuatan masker dan *handsanitizer* serta menekankan kehadiran para anggota kelompok PEKKA

maupun kelompok pendamping, menggunakan media sosial dalam memasarkan hasil karya yang dibuat dan melakukan komunikasi, tukar informasi dengan pendamping dalam memasarkan hasil karya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Agustino, Leo. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Moleong, Lexy. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. (2012). *Public policy*. Bandung: PT Elex Media Komputindo.

Silalahi, Ulber. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.

Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI: Bandung.

#### **Jurnal Ilmiah:**

Fujiani, E. D., Darusman, Y., & Oktiawanti, L.  
PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN KEPALA  
KELUARGA (PEKKA)  
MELALUI PELATIHAN  
BERWIRAUSAHA. *Indonesian Journal of Adult and Community Education*, 1(1), 20-25.

#### **Undang-Undang:**

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246) Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri rumahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan.